

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2026

PERDA KAB BARUT NO. 1, LD 2026/NO.1, TLD NO. 1, HLM. 1-13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 46 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; PP No 1 Tahun 2024; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; PP No. 39 Tahun 2019; PP No. 62 Tahun 2023; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 7 Tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024; Perda Prov Kalteng No. 16 Tahun 2008; Perda Prov Kalteng No. 4 Tahun 2014; Perda Prov. Kalteng No. 5 Tahun 2015; Perda Prov Kalteng No. 3 Tahun 2025; Perda Kab. Barut No. 3 Tahun 2019; Perda Kab. Barut No. 1 Tahun 2025.
 - Peraturan Daerah ini merupakan acuan utama perencanaan pembangunan daerah, didalam nya terdapat VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program prioritas pembangunan Barito Utara. Terdapat juga Program Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan Evaluasi pembangunan dilakukan secara berkala untuk memastikan target dan kinerja pembangunan tercapai. Mekanisme perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian atau perubahan mendasar seperti bencana, krisis ekonomi, perubahan kebijakan nasional dan kondisi lainnya. Perda ini juga memuat ketentuan peralihan dan pendanaan. Intinya: Peraturan Daerah ini menjadi “peta jalan” pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2029, yang memberikan arah mengenai apa yang ingin dicapai pemerintah daerah, strategi untuk mencapainya, program yang dilaksanakan, serta bagaimana pelaksanaan dan pencapaiannya dikendalikan dan dievaluasi.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2026.
 - Nomor registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah; 01, 10/2026